



Supervisi Dan Evaluasi Pendidikan Dalam Mewujudkan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Corry Enny Setyawati^{1*}, Henny Nikolin Tambingon², Joulanda A. M. Rawis³,
Meisie Lenny Mangantes⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Manado

Email: corryennysetyawati.se@gmail.com^{1*}, hennytambingon@unima.ac.id², joulanda_rawis@unima.ac.id³,
meisiemangantes@unima.ac.id⁴

Abstrak

UU Sisdiknas menjabarkan delapan standar nasional pendidikan yang menempatkan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai pusat penggerak delapan standar nasional pendidikan. Semua sumber daya ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan standar kualitas tinggi untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penerapan standar ketuntasan belajar tidak seefektif yang diharapkan, dan banyak tantangan yang dihadapi. Banyak sekolah dasar, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan penerapan standar ini yang terbatas. Sebagian besar sekolah dasar belum memahami makna standar ketuntasan belajar dan bagaimana kaitannya dengan standar lainnya. Akibatnya, proses pengembangan standar ketuntasan belajar hanya untuk kepentingan administratif. Salah satu indikator peningkatan standar kompetensi lulusan adalah kompetensi kepala sekolah terkait supervisi dan evaluasi guru, supervisi instruksional kepala sekolah sangat diperlukan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, pada metode ini dilakukan proses pengumpulan dan seleksi artikel, pencermatan dan analisis, serta penyajian hasil. Hasil pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan: 1) Supervisi instruksional dari kepala sekolah sangat penting untuk meningkatkan SKL, 2) Pelaksanakan supervisi pendidikan berimplikasi pada peningkatan SKL, 3) Implementasi evaluasi pendidikan berimplikasi pada tercapainya SKL.

Kata kunci: *Standar kompetensi lulusan, supervisi, evaluasi pendidikan, kurikulum*

Abstract

The Law on the National Education System describes eight national education standards that position graduates' competencies at the center of moving eight national education standards. All of these resources are intended to aid in the development of high-quality standards for mastery of knowledge, skills, and attitudes. The application of learning completeness standards is not as effective as expected, and many challenges are encountered. Many primary schools, educators, and education personnel have limited understanding and application of this standard. The majority of elementary schools do not understand the meaning of learning completeness standards and how they relate to other standards. As a result, the process of developing learning completeness standards is solely for administrative purposes. One indicator of improving graduate competency standards is the competence of principals related to teacher supervision and evaluation, principal's instructional supervision is needed. The writing of this article uses the literature review method, in this method the process of collecting and selecting articles, observing and analyzing, and presenting the results is carried out. The results of the discussion in this article can be concluded: 1) Instructional supervision from the principal is very important to improve SKL, 2) Implementing educational supervision has implications for increasing SKL, 3) Implementation of educational evaluation has implications for achieving SKL.

Keywords: *Graduate competency standards, supervision, educational evaluation, curriculum*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia selalu melakukan pembenahan di sektor pendidikan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik (Wijoyo, 2021). Upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk mengubah persepsi negara lain bahwa negara-negara berkembang tidak pandai dalam mengatur manajemen sumber daya manusia, kurang baiknya layanan pendidikan, dan kurang mampunya keterampilan administrasi untuk mendukung menjadi negara yang maju (Mustiningsih, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semua negara berkembang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan bagi masyarakat (Wijoyo, 2021). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya perbaikan tingkat dan kompetensi pendidikan. Standar Pendidikan Nasional terdiri dari 8 komponen yaitu (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan (Poerwanti, 2008).

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sesuai, setiap lulusan perlu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman (Widodo, 2021). Kompetensi merupakan kemampuan dalam berpikir, bersikap serta bertindak dengan konsisten sebagai perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan (Tanner & Tanner, 1987). Standar kompetensi lulusan adalah ukuran kompetensi minimal yang harus di capai peserta didik dalam suatu pendidikan (Poerwanti, 2008).

Teknologi yang semakin canggih diikuti dengan perubahan di lingkungan masyarakat dimana banyak permasalahan yang muncul dan semakin kompleks (Tyack & Hansot, 1980). Oleh karena itu, di bidang pendidikan pun perlu dilakukan perubahan guna memenuhi standar kompetensi (Ahmad, Aquami, & Saiful, 2021). Untuk mewujudkan hal ini tentunya perlu dukungan dari pendidik supaya bisa mengetahui kekurangan dari sistem pendidikan yang berjalan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan supervisi dan evaluasi (Raharjo, 2019).

Supervisi dan pengawasan adalah hal yang mirip, tetapi supervisi berfokus pada kegiatan pembinaan yang dirancang untuk membantu guru, staf sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugas mereka dengan sukses dan efisien (Stones, 2002). Ada banyak jenis bisnis atau kegiatan yang dapat dilakukan di bidang pengawasan, seperti kuliah, pertemuan kelompok, demonstrasi Teknik, pembicaraan individu, loka karya, kunjungan kelas, pengenalan mengenai metode pengajaran baru, penilaian sistematis, dan pertukaran pengalaman dan ide-ide baru (Engebretson, Smith, McLaughlin, Seibold, Terrett, & Ryan, 2008). Semua ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka dan memperluas perspektif mereka (Kristiawan et al., 2019).

Di bidang pendidikan, penerapan supervisi dan evaluasi dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan atau meningkatkan mutu pada semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal dan nonformal, dalam suatu sistem pendidikan nasional (Glanz & Zepeda, 2016). Kehadiran supervisi pendidikan juga menjadi syarat bagi banyak perubahan yang terjadi, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergeseran paradigma dan pergeseran politik. Peningkatan kualitas tentunya akan menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi (Oktaviani & Wulandari, 2019).

Kesadaran akan perlunya evaluasi adalah satu langkah menuju kemajuan (Wijoyo, 2021). Melakukan evaluasi merupakan salah satu teknik untuk menemukan kekurangan-kekurangan pada sistem pendidikan yang ada. Evaluasi dapat memberikan metode yang lebih komprehensif untuk menyajikan informasi kepada para pendidik untuk membantu perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Oleh karena itu, pakar pendidik, orang yang berpengaruh di ranah pendidikan, dan pemimpin perlu mendukung dan menyetujui bahwa program pendidikan harus dievaluasi (Jahanian, 2013). Pembuat kebijakan pendidikan dapat memanfaatkan hasil evaluasi untuk memandu upaya mereka untuk meningkatkan pendidikan (Raharjo, 2019). Para ahli, pemimpin sekolah, dan

perguruan tinggi dievaluasi sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan pendanaan guna melaksanakan berbagai macam program pendidikan. Guru dan pekerja menjadi sasaran evaluasi untuk menentukan kinerja mereka. Singkatnya, evaluasi telah memperoleh penerimaan secara luas dalam pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya (Ahmad et al., 2021).

Terlepas dari pergeseran ke arah model diferensiasi yang lebih besar dalam pembelajaran, supervisi, kebijakan terkait supervisi dan evaluasi tetap relatif statis saat ini. Kekhawatiran difokuskan kembali pada kompetensi kepala sekolah dalam pendidikan supervisi dan evaluasi guru (Elmore, 2000). Dalam penyusunan artikel ini, menjelaskan bahwa studi yang menerangkan bagaimana supervisi dan evaluasi dapat meningkatkan standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, artikel ini mengulas dan merangkum literatur yang ada tentang apa yang diketahui dari supervisi dan evaluasi pendidikan dan bagaimana mewujudkan peningkatan standar kompetensi lulusan.

PEMBAHASAN

Standar Kompetensi Lulusan

Pengertian Standar kompetensi Lulusan

Kompetensi adalah kemampuan untuk bertindak, berpikir, dan berperilaku secara konsisten sebagai indikasi nilai pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah seperangkat kompetensi minimal yang harus dicapai setiap siswa agar dapat dinyatakan berhasil pada jenjang pendidikan tertentu (Zahro, 2019). Kriteria kelulusan dapat diartikan sebagai poin utama yang harus dipenuhi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Rahman (2022), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk SKS Pendidikan adalah kualifikasi keterampilan lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan penyelesaian kredit pendidikan.

Fungsi/Tujuan Standar kompetensi Lulusan

Dalam Peraturan pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan di jelaskan tujuan Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut: 1) Pasal 4 ayat (4): SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Isi, Standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 1) Pasal 6: Ayat (1): SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Ayat (2): SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ayat (3): SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Ayat (4): SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Demikianlah fungsi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berdasarkan jenjang- jenjang pendidikannya.

Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan

Ruang lingkup SKL kurikulum 2013 mengacu pada bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Khaulani, Marsidin, & Subandi, 2020). Menurut Sinambela (2017) dalam kurikulum 2013 menggunakan konsep *scientific* (ilmiah) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta serta fenomena yang dapat dijelaskan secara logis atau penalaran tertentu bukan terbatas pada kira-kira, khayalan, legenda ataupun dongeng semata.

- b. Penjelasan guru dan respon siswa dan interaktif guru terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif atau penalaran menyimpang dari alur berpikir logis.
- c. Mendorong dan menginspirasi siswa berfikir secara kritis, analitis dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan teori pembelajaran. d) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berfikir hipotetik dalam melihat perbedaan dan kesamaan serta tautan satu sama lain.
- d. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami dan menerapkan serta mengembangkan pola berfikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran.
- e. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat di pertanggungjawabkan.
- f. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya
- g. Proses pembelajaran menyatukan tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- h. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.

Pencapaian Standar kompetensi Lulusan

Terdapat perbedaan pencapaian siswa yang bersekolah di jenjang negeri dan swasta. Siswa yang bersekolah di pendidikan negeri memiliki ketergantungan dengan kemampuan guru dalam mengajar, bila guru mampu menerapkan kompetensinya secara baik maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, namun terkadang guru tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan kompetensinya secara maksimal. Sedangkan pendidikan swasta proses pembelajarannya kontekstual dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran guru/ pendidik juga berpengaruh bagi pencapaian Siswa. Pendidik harus menguasai bidang dan menguasai setiap kompetensi (Engebretson, Smith, McLaughlin, Seibold, Terrett, & Ryan, 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Tenaga Kependidikan Pasal 20: Ayat (1): Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Ayat (2): kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan juga berpengaruh bagi pencapaian Siswa. Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana pasal 25: Ayat (1): Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Ayat (2): Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ayat (3): prasarana sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ayat (4): Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:

- a. Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif.
- b. Menjamin keamanan, Kesehatan, dan keselamatan.
- c. Ramah terhadap penyandang disabilitas, dan d. Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Komponen-komponen untuk mencapai Standar kompetensi Lulusan

Kompetensi inti harus digunakan sebagai langkah awal pembelajaran pada tingkat kompetensi tertentu sebelum mencapai tujuan Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi Inti (AI) adalah operasional SKL berupa kualitas yang harus dimiliki seseorang setelah menyelesaikan satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu (Rahmawati, 2018). Uraian tentang Kompetensi Inti (KI) untuk setiap mata pelajaran disajikan dalam Rumusan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti (KD) adalah kompetensi untuk setiap mata pelajaran di setiap kelas yang

diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Inti (KD) adalah isi atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diturunkan dari suatu Kompetensi Inti (KI) yang harus dikuasai oleh seorang siswa.

Dengan kata lain, SKL tidak dapat dicapai sebelum menerapkan KD dan AI. SKL adalah hasil yang dicapai setiap siswa ketika menyelesaikan pendidikannya, KD adalah kemampuan siswa, AI adalah pengetahuan atau pengalaman siswa, dan AI ini sangat menentukan peningkatan keahlian dan pengetahuan inti siswa. Modal apakah siswa dapat menghadapi masalah. Ketiga unsur ini terkait untuk mencapai kelulusan di semua jenjang pendidikan. Meningkatkan standar kelulusan Mencapai atau melampaui KKM yang ditetapkan. b. Pencapaian tingkat kelulusan 100 hanya akan memiliki nilai yang ditetapkan untuk kategori Baik. c. Rata-rata ujian negara dan sekolah dicapai pada kisaran 70,00 dan 80,00. yaitu Prestasi dalam kejuaraan, kompetisi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat distrik, negara bagian, dan federal. e. Meningkatkan jumlah lulusan yang menerima pendidikan tinggi.

Supervisi Pendidikan dalam Mewujudkan Kompetensi Lulusan

Fungsi sosial, seperti pendidikan, mengembangkan institusi dan menyempurnakan peran praktisi, dan proses ini mengembangkan profesi dan identitas (Barr, Burton, & Brueckner, 1938; Glanz, 1991; Metzger, 1987; Tyack & Hansot, 1980). Supervisi pendidikan pada dasarnya adalah perkembangan abad kedua puluh yang bergantung pada profesionalisasi pengajaran dan pengembangan sekolah umum abad kesembilan belas (Barr et al., 1938; Button, 1966; Glanz & Zepeda, 2016; Kyte, 2019).

Supervisi dalam hal ini mempunyai pengertian yang luas, yakni segala macam bentuk bantuan dari para pimpinan sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan para pegawai sekolah lainnya di dalam mencapai tujuantujuan pendidikan. Bantuan tersebut berupa bimbingan, dorongan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru. Sebagai contoh, misalnya bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang baik terhadap fase dari seluruh proses pengajaran.

Supervisi sebagai suatu bentuk pengawasan langsung biasanya dilakukan secara berhadapan-hadapan antara pengawas dan para guru. Supervisi termasuk kewajiban terpokok dalam administrasi dan merupakan pusat perhatian bagi perkembangan para siswa dan perbaikan pengajaran dengan segala aspek-aspeknya. Untuk mencapai tujuan mulia dari pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik, evolusi peran supervisi pendidikan menimbulkan banyak pertanyaan yang masih belum terpecahkan sampai hari ini (Burnham, 1976; Burr, 1924; Frymeier, 1969).

Tantangan lainnya adalah memahami berbagai istilah yang terkait dengan bidang studi ini. supervisi pendidikan (misalnya Kyte, 2019); supervisi klinis (misalnya Goldhammer, 1969; Kayıkçı, Yilmaz, Sahin, 2017); supervisi pendidikan (Barr et al., 1938); (misalnya Mackenzie & Corey, 1954). Seperti yang Glanz dan Zepeda (2016) nyatakan bahwa pendekatan supervisi dimulai dengan definisi pengajaran yang baik, dan kontes yang dihasilkan mengenai isi dan metode pengajaran yang baik bertahan sebagai kebijakan tentang perubahan pendidikan (Tyack & Hansot, 1980). Fokus kaum Progresif pada metode, alih-alih konten, mungkin merupakan reaksi terhadap dominasi memori hafalan dan pembacaan, di mana, bisa dibilang, Dewey memimpin tuntutan untuk metode keterlibatan dan penemuan instruksi (Bullough, 2014).

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar kompetensi lulusan, peranan pengawas satuan pendidikan/sekolah/madrasah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya. Oleh sebab itu pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan memiliki kompetensi supervisor. seperti yang diamanatkan dalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 bahwa ruang lingkup kompetensi supervisor meliputi kegiatan-kegiatan: (1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan

teknik supervisi yang tepat; (3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Selain dari itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas harus dibina agar citra pengawas satuan pendidikan atau sekolah/madrasah lebih meningkat sebagaimana yang kita harapkan. Pengawas harus mempunyai nilai lebih dari guru dan kepala sekolah/madrasah baik dari segi kualifikasi, kompetensi, finansial dan dimensi lainnya agar kehadirannya di sekolah betul-betul didambakan *stakeholder* sekolah. Di pihak pengawas sekolah sendiri kini semakin dihadapkan dengan tantangan tuntutan kualitas pendidikan dan standar kompetensi lulusan yang lebih unggul. Terlebih bila dihubungkan dengan era perdagangan bebas yang menuntut dunia pendidikan di Indonesia peka terhadap tuntutan kualitas berstandar internasional.

Ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan yaitu pengembangan kurikulum dan pengembangan personal. Perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan (Sarnoto, 2012). Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Namun demikian, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus (Burnham, 1976). Banyak hal sering menghambat yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai (Frymeier, 1969). Dengan demikian, guru dan Kepala Sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling dasar memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum (Glanz, 1997). Berikutnya adalah pengembangan personal, pegawai atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, lokakarya dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya (Tyack & Hansot, 1980). Kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan supervisi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut dilakukan karena proses belajar-mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama (Scott, 1925). Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran (Kristiawan, Yuniarsih, Fitria, & Refika, 2019; Tanner & Tanner, 1987).

Adapun dampak supervisi pendidikan di sekolah yaitu sebagai berikut pembelajaran (Kristiawan et al., 2019;).

1. Meningkatkan mutu kinerja guru, membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut, membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya, membentuk kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan bersahabat dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian dan alat pengajaran, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi Kepala Sekolah untuk reposisi guru.
2. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik;
3. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan.
5. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Jadi, supervisi sangatlah penting untuk dilaksanakan, karena supervisi pada dasarnya dilaksanakan demi tercapainya perubahan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik atau bahkan terbaik, terutama dalam bidang SDM yang dalam hal ini mencakup guru, Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Pelaksanaan supervisi yang baik dan benar akan menghasilkan perubahan-perubahan yang baik pula, maka dari itu supervisi harus dilakukan sesuai dengan tata peraturan yang baik dan benar, serta tidak adanya diskriminasi dan saling memihak.

Pendapat Sudarwan (2020) bahwa, *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap proses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Mutu suatu pendidikan hanya dapat terwujud atau terproses melalui guru yang berkualitas dan guru yang profesional.

Supervisi diharapkan mampu menyediakan bermacam-macam kepemimpinan yang mampu meningkatkan efisiensi dan dayaguna usaha dan program dari usaha sekolah secara keseluruhan serta untuk menambah atau memperkaya lingkungan semua guru. Hal ini meliputi usaha-usaha untuk membangun semangat para karyawan, menciptakan kondisi-kondisi bekerja yang menyenangkan, mendorong inisiatif dan daya cipta, menyediakan kesempatan-kesempatan agar para guru dapat bekerja sama dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka dan sekolah. Para guru diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan administratif, dalam menentukan langkah-langkah untuk tercapainya berbagai tujuan, menilai program sekolah, dan dalam segala usaha perubahan seperti peningkatan standar kompetensi lulusan dan perbaikan program yang didasarkan atas penilaian yang obyektif dan koperatif (Kristiawan et al., 2019).

Evaluasi Pendidikan dalam Mewujudkan Kompetensi Lulusan

Ketika kita mempertimbangkan ciri-ciri yang menentukan dari pengembangan profesional yang efektif, menjadi jelas bagaimana mereka bekerja sama untuk mendefinisikan kembali sekolah sebagai organisasi pembelajar. Memperlakukan guru sebagai pembelajar, mempromosikan penyelidikan dan refleksi, memfasilitasi pembelajaran pengalaman dan kolaboratif yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan sekolah, membangun mekanisme evaluasi dan umpan balik; dan memastikan bahwa pengembangan profesional tertanam dalam praktik sehari-hari sekolah, membangun basis pengetahuan bersama, dan menciptakan peluang untuk belajar dari jaringan eksternal serupa dengan melembagakan pencarian dan penggunaan sebagai proses sekolah yang penting. Faktanya, atribut pengembangan profesional yang efektif tidak dapat dipisahkan dari pencarian dan penggunaan eksplorasi dan eksploitasi karena mereka menciptakan lingkungan di mana eksplorasi mengarah pada eksploitasi dan sebaliknya (Levitt & March, 1988).

Untuk menanamkan pengembangan profesional dalam rutinitas sehari-hari guru dan mempromosikan pembelajaran pengalaman, penyelidikan, dan refleksi adalah untuk menciptakan lingkungan di mana guru dapat memanfaatkan sumber daya sekolah saat ini dan pengetahuan mereka saat ini dan mengeksplorasi dan menguji ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja dan siswa mereka (Bullough, 2014). Evaluasi dan umpan balik (misalnya, pembinaan dan pendampingan) juga memfasilitasi eksploitasi dan eksplorasi, karena keduanya merupakan mekanisme untuk meningkatkan praktik saat ini dan peluang bagi guru untuk mempelajari keterampilan dan ide baru untuk meningkatkan kinerja guru. Ketika guru berkolaborasi dan terhubung dengan jaringan eksternal, mereka dapat berinovasi dalam praktik mereka saat ini (eksploitasi) atau menguji praktik baru yang mereka

pelajari (eksploitasi) (Levitt & March, 1988). Dan, karena pengembangan profesional yang efektif bersifat jangka panjang, guru dapat terlibat dalam siklus eksplorasi dan eksploitasi yang berkelanjutan; menguji, mengevaluasi, menyimpan, berbagi, menggunakan kembali, mengadaptasi, dan berinovasi pada apa yang mereka pelajari. Ketika pengembangan profesional adalah jangka panjang dan tertanam dalam rutinitas harian sekolah, ketika pengalaman, berbasis penyelidikan, reflektif, kolaboratif, dan diarahkan untuk menyimpan pengetahuan dan berjejaring di luar sekolah, membangun kapasitas sekolah, dengan demikian menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sekolah untuk memahami reformasi baru, mengadaptasi praktik untuk memenuhi kebutuhan siswa (atau kebijakan) yang berubah, dan berinovasi baik pada praktik saat ini, atau dengan mengadopsi dan mengubah praktik baru. Faktanya, sebuah studi oleh (Giles & Hargreaves, 2006). menunjukkan bahwa sekolah yang didirikan sebagai organisasi pembelajaran paling mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kebijakan dan mengubah praktik untuk memenuhi mandat kebijakan tanpa mengorbankan pembelajaran otentik, pemberdayaan guru, atau inovasi.

Tujuan evaluasi pendidikan secara implisit yakni untuk menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Tujuan khusus mencakup upaya memberikan masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, hasil program pendidikan kurikulum, tanggapan masyarakat tentang program, sumber daya program pendidikan, dampak pembelajaran, manajemen program pendidikan (Sudjana, 2006).

Secara umum, menurut Sudijono (2016) tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu:

1. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.

Tujuan khusus dari kegiatan evaluasi pendidikan adalah:

1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.
2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat mencari jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi pendidikan dapat merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dari kegiatan evaluasi kita dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi peserta didik sehingga dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur (*literature review*) dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. *Literature review* merupakan tentang teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Penelitian yang dirumuskan dengan melakukan penelitian menggunakan *literature review* memungkinkan dapat memberikan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian terhadap perubahan paradigma pembelajaran di pendidikan tinggi. Pada penelitian ini akan membahas artikel-artikel penelitian mengenai penerapan supervisi dan evaluasi pendidikan serta hubungannya dengan standar kualitas kompetensi lulusan. Pengumpulan literatur menggunakan google scholar untuk mendapatkan kumpulan artikel jurnal, *textbook*, *handbook*, arsip yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pengembangan kurikulum haruslah mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Ini terbukti bahwa banyak hal prestasi peserta didik didalam akademik dan intelektualitas sangat menggembirakan dengan adanya pengembangan kurikulum sesuai dengan perubahan zaman tersebut. Selain itu, dalam jenjang pendidikan pasti ada Standar kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator karena untuk mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dan tujuan apa saja yang harus dicapai sehingga mudah karena sudah di atur oleh tiap sekolah. Dari Standar kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator tadilah pendidik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan dan sikap peserta didik sehingga dapat dijadikan bahan penilaian hasil pembelajaran dan menjadi tolak ukur tentang penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu dan juga akan menjadi Standar Kompetensi Lulusan Satuan pendidikan. Pembahasan pada penelitian ini mengarah kepada Standar Kompetensi Lulusan yang harus di lalui setiap peserta didik agar dapat dinyatakan

Lulus oleh sekolah yang bersangkutan.

Supervisi diharapkan mampu menyediakan bermacam-macam kepemimpinan yang mampu meningkatkan efisiensi dan dayaguna usaha dan program dari usaha sekolah secara keseluruhan serta untuk menambah atau memperkaya lingkungan semua guru. Hal ini meliputi usaha-usaha untuk membangun semangat para karyawan, menciptakan kondisi-kondisi bekerja yang menyenangkan, mendorong inisiatif dan daya cipta, menyediakan kesempatan-kesempatan agar para guru dapat bekerja sama dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka dan sekolah. Para guru diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan administratif, dalam menentukan langkah-langkah untuk tercapainya berbagai tujuan, menilai program sekolah, dan dalam segala usaha perubahan seperti peningkatan standar kompetensi lulusan dan perbaikan program yang didasarkan atas penilaian yang obyektif dan koperatif.

Secara umum tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu: 1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan evaluasi pendidikan adalah: 1) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat mencari jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi pendidikan dapat merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dari kegiatan evaluasi kita dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi peserta didik sehingga dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan.

SIMPULAN

Dari hasil *literature review* dapat disimpulkan bahwa Untuk mencapai tingkat kompetensi lulusan yang sesuai, setiap lulusan harus mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan secara tepat waktu. Standar Kompetensi Lulusan adalah tingkat kompetensi minimal yang harus dicapai seorang mahasiswa dalam pendidikan. Dalam pendidikan, praktik supervisi dan evaluasi dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan atau meningkatkan mutu semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal dan nonformal, dalam sistem pendidikan suatu negara. Selain itu, karena banyak perubahan yang terjadi, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran paradigma, dan perubahan politik, maka perlu mengiringi pendidikan. Peningkatan kualitas tentunya menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kecakapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., Aquami, A., & Saiful, A. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. Cv. Penerbit Qiara Media.
- Anas Sudijono. (2016). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Barr, A. S., Burton, W. H., & Brueckner, L. J. (1938). *Supervision: Principles and practices in the improvement of instruction*. Appleton-Century.
- Bullough, R. V. (2014). Recalling 40 years of teacher education in the USA: A personal essay. *Journal of Education for Teaching, 40*(5), 474–491. <https://doi.org/doi:10.1080/02607476.2014.956537>
- Burnham, R. M. (1976). Instructional supervision: Past, present and future perspectives. *Theory into Practice, 15*(4), 301–305. <https://doi.org/doi:10.1080/00405847609542647>
- Burr, A. W. (1924). How is supervised study doing? *School Review, 32*(3), 224–226.
- Button, H. W. (1966). Doctrines of administration: A brief history. *Educational Administration Quarterly, 2*(3), 216–224. <https://doi.org/doi:10.1177/0013161X6600200306>
- Elmore, R. F. (2000). *Building a new structure for school leadership*. Albert Shanker Institute.
- Engebretson, K., Smith, K., McLaughlin, D., Seibold, C., Terrett, G., & Ryan, E. (2008). The changing reality of research education in Australia and implications for supervision: A review of the literature. *Teaching in Higher Education, 13*(1), 1–15.
- Frymeier, J. (1969). The supervisor and his professional identity. In W. H. Lucio (Ed.). In *The supervisor: New demands, new dimensions* (pp. 83–102). Association for Supervision and Curriculum Development.
- Giles, C., & Hargreaves, A. (2006). The sustainability of innovative schools as learning organizations and professional learning communities during standardized reform. *Educational Administration Quarterly, 42*(1), 124–156.
- Glanz, J., & Zepeda, S. J. (2016a). Creating transformational change through a focus on instructional supervision in a continuing age of high-stakes accountability. *Supervision: New Perspectives for Theory and Practice, 241–268*.
- Glanz, J., & Zepeda, S. J. (2016b). *Supervision: New perspective for theory and practice*. Rowman & Littlefield.
- Glanz, J. (1991). *Bureaucracy and professionalism: The evolution of public school supervision*. Associated University Presses.
- Glanz, J. (1997). *Educational Supervision: Perspectives, Issues, and Entroversies*.
- Goldhammer, R. (1969). *Clinical supervision: Special methods for the supervision of teachers*. Holt McDougal.
- Jahanian, R. (2013). *Principles for Educational Supervision and Guidance, 4*(2), 380–390. <https://doi.org/10.5296/jsr.v4i2.4562>
- Kayıkçı, K., Yilmaz, O., & Sahin, A. (2017). The Views of Educational Supervisors on Clinical Supervision. *Online Submission, 8*(21), 159-168.
- Khaulani, F., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Isi Di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2*(2), 121–127.
- Kristiawan, M., Yuniarsih, Y., Fitria, H., & Refika, N. (2019). *Supervisi pendidikan*. Alfabeta, 4.
- Kristiawan, M., Yuyun Yuniarsih, Mp., Happy Fitria, Mp., & Nola Refika SPd, Mp. (2019). *Supervisi Pendidikan* (Issue April). www.cvalfabeta.com
- Kyte, G. C. (2019). *How to supervise: A guide to educational principles and progressive practices of educational supervision*. Houghton Mifflin.
- Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. *Annual Review of Sociology, 319–340*.

- Mackenzie, G. N., & Corey, S. M. (1954). *Instructional leadership*. Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University.
- Metzger, W. P. (1987). A spectre is haunting American scholars: The spectre of "professionalism." *Educational Researcher*, 16(6), 10–19. <https://doi.org/doi:10.3102/0013189X016006010>
- Mustiningsih. (2013). Manajemen Pendidikan , Budaya Organisasi, Proses Kerja Tim, dan Kinerja Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(1), 3.
- Oktaviani, N. M., & Wulandari, I. (2019). *Implementation of Standard of Graduate Competence in The Curriculum 2013 in Elementary Schools*. 2(2), 126–135.
- Poerwanti, E. (2008). *Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)*.
- Raharjo, S. B. (n.d.). *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. 511–532.
- Rahman, A. (2022). Upaya peningkatan standar kompetensi lulusan. *ADIBA: Journal Of Education*, 2(1), 122–132.
- Rahmawati, A. N. (2018). Identifikasi masalah yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013 revisi di SD. *Indonesian Journal of Primary Education*, 2(1), 114–123.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Urgensi Supervisi Pengajaran Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Statement*, 2(2), 55–66.
- Scott, C. E. (1925). *Educational supervision*. Bruce Publishing Company.
- Sinambela, P. N. (2017). Kurikulum 2013 dan implementasinya dalam pembelajaran. *Generasi Kampus*, 6(2), 17–29.
- Stones, E. (2002). *Supervision in teacher education: A counselling and pedagogical approach*. Routledge.
- Sudarwan, D. (2020). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bumi Aksara.
- Sudjana, D. (2006). Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal. *Jurnal Ilmiah Visi*, 1(1), 14–18.
- Tanner, D., & Tanner, L. (1987). *Supervision in Education: Problems and Practices*. Macmillan Publishing Company, 866 Third Avenue, New York, NY 10022.
- Tyack, D., & Hansot, E. (1980). From social movement to professional management: An inquiry into the changing character of leadership in public education. *American Journal of Education*, 88(3), 291–319. <https://doi.org/doi:10.1086/443528>
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. UAD PRESS.
- Wijoyo, H. (2021). *Penguatan Pendidikan Nasional Guna Menjaga Kemajemukan Bangsa Indonesia dalam Rangka Keutuhan NKRI*. Insan Cendekia Mandiri.
- Zahro, N. (2019). *Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan Di Min 1 Purbalingga (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto)*.